

**PENGARUH KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA
TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI DESA
BONGOIME KECAMATAN TILONGKABILA
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh:
TEUKU MUHAMAD HIKMAT NURSALIM
NIM: S.2121014

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGARUH KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI DESA BONGOIME KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

OLEH :

TEUKU MUHAMAD HIKMAT NURSALIM

NIM: S2121014

SKRIPSI

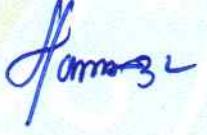
Untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Telah di setujui oleh Tim Pembimbng Pada Tanggal, 11 Maret 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Bala Bakri, S.I.P., S.E., S.Psi., MM
NIDN :00200575001


Swastiani Dunggio, S.I.P., M.Si
NIDN: 0930048307

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Swastiani Dunggio, S.I.P., M.Si
NIDN: 0930048307

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

PENGARUH KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI DESA BONGOIME KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

OLEH :

TEUKU MUHAMAD HIKMAT NURSALIM

NIM: S2121014

SKRIPSI

Telah Dipertahankan dihadapan Penguji
Pada Tanggal 13 Maret 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Komisi Penguji :

1. Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
2. Dr. Andi Subhan, S.S., M.Pd
3. Purwanto, S.I.P., M.Si
4. Dr. Bala Bakri, S.I.P., SE., S.Psi., MM
5. Swastiani Dunggio, S.I.P., M.Si

Mursiawie
.....
Andi Subhan
.....
Purwanto
.....
Bala Bakri
.....
Swastiani Dunggio
.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Mursiawie
Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN:0913027101

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Jomm32
Swastiani Dunggio ,S.I.P., M.Si
NIDN:0930048307

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Teuku Muhamad Hikmat Nursalim
NIM : S2121014
Konsentrasi : Politik
Program Study : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Komunikasi Politik Kepala Desa Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Desa Bongoiine Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango” adalah benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun program tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Penyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Gorontalo, Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Teuku Muhamad Hikmat Nursalim

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Persembahan

Sujud syukur kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi hamba yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk, kedua orangtua saya. Ayah, & Almh. Mama tercinta, Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Lalu teruntuk Bunda Ramlah Habibie, terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah Bunda lakukan, semua yang terbaik.

Terima kasih untuk kakak-kakak saya yang luar biasa, dalam memberi dukungan dan doa yang tanpa henti. Kakak-kakak yang selama ini sudah menjadi saudara sekaligus sahabat bagi saya. Kalian adalah tempat saya berlari ketika saya merasa tidak ada yang memahami di luar rumah.

Terima kasih yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing, Bapak/Ibu yang dengan sabar membimbing saya selama penelitian ini. Terima kasih juga untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

ABSTRAK

TEUKU MUHAMAD HIKMAT NURSALIM. NIM: S.2121014.
PENGARUH KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA TERHADAP KINERJA
PELAYANAN PUBLIK DI DESA BONGOIME KECAMATAN TILONGKABILA
KABUPATEN BONE BOLANGO. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo, Tahun 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi politik kepala desa terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 41 orang. Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik kepala desa berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime, dengan kategori sedang yang menunjukkan bahwa komunikasi politik Kepala Desa Bongoime belum begitu maksimal dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik aparatur pemerintah Desa

Kata kunci : kinerja; pelayanan publik; komunikasi politik.

ABSTRACT

TEUKU MUHAMAD HIKMAT NURSALIM. S2121014. THE IMPACT OF VILLAGE HEAD POLITICAL COMMUNICATION ON PUBLIC SERVICE PERFORMANCE IN BONGOIME VILLAGE, TILONGKABILA SUBDISTRICT, BONE BOLANGO REGENCY

This research aims to know the impact of the village head's political communication on public service performance in Bongoime Village, Tilongkabila Subdistrict, Bone Bolango Regency. A quantitative approach with a survey method is employed for this research, involving a sample size of 41 participants. Data analysis employs simple linear regression analysis. The results indicate that the village head's political communication significantly impacts public service performance in Bongoime Village, categorizing the impact as moderate. This research suggests that the political communication efforts of the Bongoime Village Head have not been fully effective in enhancing the public service performance of the village government staff.

Keywords: *performance, public service, political communication*

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur, penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena berkat bimbingan dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi dengan judul “PENGARUH KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI DESA BONGOIME KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO”. Penulis menyadari sepenuhnya sebagai manusia biasa yang mempunyai kemampuan yang terbatas, isi dan meteri yang terkandung dalam Skripsi ini masih sangat terbatas dan banyak kekurangannya.

Penulis terus berupaya untuk memperbaiki isi dan materi Skripsi ini, dan berkat masukan dari bapak dan ibu dosen pembimbing, penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai pendidikan sampai sarjana, ayahanda FIRDAUS AGAM, S.ST dan ibunda almarhumah TITI RAHAYU HABIBIE, SH. Dan Juga kepada Ibu Hj RAMLAH HABIBIE S.PD.,MM yang sudah seperti ibu kandung saya.. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si, selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.

2. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Moch. Sakir, S,Sos., S.I.Pem., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Purwanto, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dwi Ratnasari, S,Sos., M.I.Kom sebagai Wakil Dekan II.
5. Ibu Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing II atas masukan dan koreksi perbaikan.
6. Bapak Dr. Bala Bakri, S.E., S.IP., MM sebagai pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini, yang banyak memberikan masukan dan juga koreksi perbaikan.
7. Seluruh Dosen, terutama pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa yang telah memberikan motivasi sehingga Skripsi ini dapat dirampungkan.

Penulis berharap, segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah Subhahana Wa Ta'ala, dan semoga mendapat lindungan-Nya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Gorontalo 11 Maret 2025
Penulis

Teuku Muhamad Hikmat Nursalim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori	7
2.2 Komunikasi Politik.....	7
2.2.1 Konsep Komunikasi	7
2.2.2 Fungsi Komunikasi.....	11
2.2.3 Konsep Komunikasi Politik.....	13
2.2.4 Indikator Komunikasi Politik.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Publik	19
2.3.1 Konsep Kinerja.....	19
2.3.2 Konsep Pelayanan Publik.....	22
2.3.3 Indikator Kinerja Pelayanan Publik.....	24
2.4 Pemerintah Desa.....	25
2.5 Kerangka Pikir.....	26
2.6 Hipotesis.....	28

BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian.....	30
3.2 Desain Penelitian.....	30
3.3 Operasionalisasi Variabel.....	30
3.4 Populasi.....	34
3.5 Sampel.....	34
3.6 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.8 Prosedur Penelitian.....	36
3.9 Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1 Sejarah Desa Bongoime	40
4.1.2 Uraian tugas pokok dan fungsi.....	41
4.2 Hasil Penelitian.....	44
4.3 Gambaran Variabel Penelitian	47
4.3.1 Deskriptif komunikasi politik kepala desa (variabel X)	48
4.3.2 Deskriptif kinerja pelayanan publik (variabel Y)...	53
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis	59
4.5 Pembahasan.....	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasionalisasi variabel X dan Y.....	32
Tabel 3.2 Interpretasi koefisien.....	37
Tabel 4.1 Hasil pengujian validitas komunikasi politik kepala desa (variabel X) dan kinerja pelayanan publik (variabel Y).....	45
Tabel 4.2 Hasil uji reliabilitas komunikasi politik kepala desa (variabel X) dan kinerja pelayanan publik (variabel Y).....	47
Tabel 4.3 Tanggapan responden tentang kepala desa dapat membentuk pengertian bersama diantara aparatur desa dan masyarakat.....	48
Tabel 4.4 Tanggapan responden tentang kepala desa dapat membentuk opini publik yang positif tentang pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa.....	49
Tabel 4.5 Tanggapan responden tentang kepala desa dapat mempengaruhi masyarakat dengan berbagai pesan yang disampaikan, seperti memberi nasehat dan peringatan.....	49
Tabel 4.6 Tanggapan responden tentang kepala desa berkomunikasi tatap muka dengan aparatur desa dan warga masyarakat tentang berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik.....	50
Tabel 4.7 Tanggapan responden tentang kepala desa menggunakan media cetak dan media elektronik dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik di desa.....	51
Tabel 4.8 Tanggapan responden tentang informasi yang disampaikan kepala desa, baik melalui komunikasi tatap muka, media cetak dan media elektronik, dapat dipahami oleh warga masyarakat.....	51
Tabel 4.9 Tanggapan responden tentang masyarakat aktif memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang mereka terima, karena kegiatan komunikasi kepala desa.....	37
Tabel 4.10 Tanggapan responden tentang pelayanan publik dapat dijangkau	

secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan, baik menyangkut tempat, jarak dan prosedur pelayanan.....	53
Tabel 4.11 Tanggapan responden tentang pemerintah desa mengedepankan jenis pelayanan secara terus menerus yang tersedia bagi masyarakat	54
Tabel 4.12 Tanggapan responden tentang terdapat kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan publik yang diterima warga masyarakat.....	54
Tabel 4.13 Tanggapan responden tentang proses pelayanan publik ditangani oleh aparatur yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan...	55
Tabel 4.14 Tanggapan responden tentang aparatur dapat memberikan solusi atau jalan keluar apabila warga masyarakat menghadapi hambatan dalam pelayanan publik.....	56
Tabel 4.15 Tanggapan responden tentang pelayanan se bisa mungkin dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.....	56
Tabel 4.16 Tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan aparatur desa memberikan keuntungan ekonomis dan sosial bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.....	57
Tabel 4.17 Tanggapan responden tentang proses dan produk pelayanan yang telah diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.....	58
Tabel 4.18. Tanggapan responden tentang mutu pelayanan yang diterima warga masyarakat dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan dan masyarakat.....	58
Tabel 4.19 Hasil uji korelasi.....	58
Tabel 4.20 Model summary komunikasi politik kepala desa (variabel X) terhadap kinerja pelayanan publik (variabel Y).....	60
Tabel 4.21 Koefisien korelasi komunikasi politik kepala desa (variabel X) terhadap kinerja pelayanan publik (variabel Y).....	61

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang terkecil, namun paling terdepan dan terdekat dengan warganya. Terdepan mengandung makna bahwa pemerintah desa berhubungan langsung dengan warga masyarakat, baik dalam bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Terdekat berarti pemerintah desa secara administratif dan geografis dirasa paling dekat untuk diakses, dimana secara sosial, pemerintah desa itu menyatu dengan denyut nadi kehidupan sosial budaya sehari-hari masyarakat setempat. Kondisi demikian yang yang menyebabkan seringkali proses pelayanan administrasi dan penyelesaian permasalahan sosial lebih banyak dibawa kepemerintah desa, sehingga kepada desa dan perangkat desa dituntut untuk bisa melayani masyarakat tanpa mengenal hari libur.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan seluruh program dari pemerintah. Hal tersebut akan benar-benar terwujud, jika desa mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan semestinya. Eko (2014) mengatakan lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 memiliki misi yang sangat mulia. Artinya, desa sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, akan diberikan kedudukan istimewa oleh negara, dan akan menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis serta menjadi pondasi yang kokoh bagi

masyarakat. Tata kelola dan pelaksanaan pembangunan. Menuju masyarakat. Adil, kaya, sukses. Dengan demikian, pembangunan masyarakat desa mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ini akan dilaksanakan secara terpadu, dengan mempromosikan pemerintahan mandiri masyarakat dan kerja sama bersama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan mutu hidup, keterampilan, dan keterlibatan masyarakat, dengan membangun kemampuan dan potensi sumber daya alam.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan publik oleh pemerintah desa, kepala desa juga dituntut untuk dapat melaksanakan komunikasi politik yang baik, sehingga masyarakat akan mendukung setiap program dari pemerintah desa. Pelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja pemerintahan desa. Karena kualitas pelayanan publik menyangkut kepentingan orang banyak dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat dari segala lapisan masyarakat, maka warga negara dapat secara langsung menilai kinerja pemerintahannya melalui kualitas pelayanan publik yang diterimanya. Hasil dalam Pengembangan Pelayanan Publik Praktik kerja yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel meningkatkan citra positif pemerintah di mata masyarakat desa.

Demikian halnya dengan pemerintah Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Desa Bongoime memerlukan dukungan berbagai elemen, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Dalam hal ini, pemerintahan desa Bongoim adalah suatu organisasi, sehingga kinerja

pemerintahan desa adalah kinerja organisasi. Kinerja organisasi sangatlah penting. Sebab, jika organisasi penyelenggara pelayanan publik itu baik, maka pelayanan publik pun akan terlaksana dengan baik dan dinilai baik.

Dari pihak pemerintah Desa Bongoime misalnya, karakteristik birokrasi beserta segenap orientasi politiknya akan membawa konsekuensi tersendiri bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Sementara dari sisi masyarakat sebagai pengguna jasa layanan misalnya, tingkat partisipasi yang rendah dan kurangnya refleksi kritis terhadap pekerjaan pemerintah melemahkan posisi masyarakat, sehingga mereka tidak punya pilihan selain menerima layanan apa adanya, meskipun kualitasnya tidak memuaskan. Hasil pengamatan penulis tentang kinerja pelayanan publik di Kantor Desa Bongoime, masih terdapat permasalahan seperti kurangnya jelasnya prosedur pelayanan di kantor desa sehingga masyarakat bingung mau mulai dari mana pelayanan ketika tiba di kantor desa; masih ada aparatur yang kurang memahami secara teknis pelayanan berdasarkan kejelasan dan sistem pelayanan online, dimana beberapa aparatur desa kurang menguasai dalam proses melayani pengurusan secara online kepada warga. Permasalahan lainnya yakni sebagian aparatur pemerintah desa tidak ada di kantor pada saat jam kerja, yang disebabkan karena tidak adanya ketentuan waktu kerja yang jelas bagi aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintah desa yang seharusnya bekerja dari jam 07.30 pagi. Hal ini tentunya membuat prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik tidak dapat berjalan dengan baik. Pelayanan publik yang seharusnya dilakukan secara sederhana, cepat, tepat, dan mudah baik dari segi waktu, biaya maupun prosedur

pelayanan menjadi tidak optimal, sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah desa dalam menanggapi atau memenuhi harapan serta tuntutan masyarakat secara cepat dan tepat waktu kurang dapat dapat terpenuhi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Saputra (2020) menyimpulkan bahwa minimnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat karena rendahnya pemahaman pemerintah desa terhadap akuntabilitas dalam penerapan standar pelayanan dan administrasi yang baik, serta rendahnya pemahaman aturan, norma dan etika yang berkembang baik itu di pemerintah desa dan masyarakat.

Kinerja Pemerintah Desa yang optimal dalam meningkatkan pelayanan publik memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan yang memadai. Di samping itu, komunikasi kepala desa juga harus ditingkatkan, baik pada aparatur desa maupun kepada warga masyarakat, agar ditemukan permasalahan keduanya.

Dalam pandangan komunikasi politik pada dasar demokrasi, salah satu cara kepala desa untuk memperoleh persepsi yang baik di masyarakat adalah dengan cara berkomunikasi. Tentu saja yang dimaksud dengan komunikasi tersebut dilakukan secara lisan atau memanfaatkan media massa yang ada, seperti koran, radio, website, dan lain-lain, atau memanfaatkan non media massa, seperti spanduk, baliho, dan lain-lain, atau bisa juga melalui saluran komunikasi interpersonal, saluran komunikasi kelompok, dan saluran komunikasi organisasi. Akib, dkk (2023:2) mengatakan bahwa komunikasi politik adalah proses pertukaran informasi, pesan, dan gagasan antara

aktor-aktor politik (seperti partai politik, pemimpin politik, atau kelompok advokasi) dengan tujuan mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku masyarakat dalam konteks politik. Komunikasi politik bertujuan untuk mempengaruhi persepsi, memperoleh dukungan, membangun citra, dan mempengaruhi keputusan politik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Simbolon dan Ivanna (2024) menyimpulkan komunikasi politik pemerintahan desa berperan penting dalam peningkatan pelayanan masyarakat. Komunikasi politik yang efektif antara pemerintah desa dan warga dapat memperkuat rasa saling percaya dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Komunikasi Politik Kepala Desa Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok sebagai berikut:

Seberapa besar pengaruh komunikasi politik kepala desa terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu data analisis mengenai pengaruh komunikasi politik kepala desa terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

1.3.2 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh komunikasi politik kepala desa terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dalam mewujudkan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat melalui komunikasi politik kepala desa.

2. Dari segi teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan konsep komunikasi politik dan kinerja pelayanan publik yang telah diterima selama perkuliahan.

3. Dari segi peneliti

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti menyangkut masalah komunikasi politik dan kinerja pelayanan publik. Sedangkan untuk peneliti sendiri, hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai bahan perbandingan antara teori dan konsep selama perkuliahan dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Politik

2.1.1 Konsep Komunikasi

“Komunikasi” berasal dari bahasa Latin “cum” (preposisi yang berarti “dengan” atau “dengan”) dan “unit” (angka “satu”). Kedua kata ini membentuk kata benda “communio.” Ini adalah kata bahasa Inggris “communion,” yang berarti kesatuan, solidaritas, komunitas, koneksi, persatuan, atau hubungan. Karena memiliki komunitas memerlukan usaha dan kerja, kata tersebut berubah menjadi kata kerja: berkomunikasi. Berarti berbagi sesuatu dengan seseorang, bertukar sesuatu, berbicara kepada seseorang tentang sesuatu, memberi tahu seseorang. “Untuk melakukan sesuatu,” “untuk berbincang-bincang,” “untuk bertukar ide,” “untuk terhubung,” “untuk menjadi teman,” dan sebagainya. Oleh karena itu komunikasi berarti pemberitahuan, percakapan, pertukaran gagasan dan hubungan (Hardjana dalam Umam, 2019:-219)

Komunikasi adalah proses dan kegiatan penyampaian informasi atau pesan dari seorang komunikator kepada penerima, yang menanggapi informasi yang disampaikan oleh komunikator. Cangara (2018:1) menyatakan bahwa komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia untuk bertahan hidup dalam masyarakat. Kemudian Rogers dan Kincaid dalam Cangara (2018:19) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau bertukar informasi satu sama lain, yang menghasilkan saling

pengertian yang lebih dalam. Menurut Cangara (2018:56), berkomunikasi dengan diri sendiri membantu mengembangkan imajinasi kreatif, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Mengembangkan imajinasi kreatif berarti menggunakan kekuatan nalar untuk menciptakan sesuatu melalui komunikasi dengan diri sendiri. Dengan cara demikianlah seseorang dapat menyadari keterbatasan dirinya, mengenal dirinya, bagaimana seharusnya ia bersikap, dan bagaimana menempatkan dirinya di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Bangin (2018:57) menyatakan bahwa komunikasi adalah (a) proses yang dilalui seseorang untuk memberi makna pada informasi, sikap, dan perilaku orang lain. b) Menerima informasi dari orang lain dalam bentuk pengetahuan, bahasa, gerak tubuh, sikap, perilaku dan emosi, dan menanggapi informasi, sikap dan perilaku tersebut berdasarkan pengalaman sebelumnya.

Pada hakikatnya, komunikasi berarti penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Suatu proses komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan diterima dan dimaknai oleh subjek komunikasi atau penerima pesan dalam bentuk, semangat, dan makna yang sama persis dengan yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kasusnya. Menurut Pasolong (2018: 444 26) prinsip ini berlandaskan pada pemikiran bahwa komunikasi harus mampu mengungkapkan emosi seseorang, baik tujuannya untuk mengkomunikasikan keputusan, melakukan pengendalian atau pengawasan, maupun untuk menggerakkan bawahan. Hal ini sangat mendasar, terlepas dari tujuan

komunikasi, apakah untuk menampilkan pesan atau menyampaikan informasi. pihak yang membutuhkan.

Selanjutnya menurut Mulyana dan Rakhmat (2018:16) mengatakan bahwa bila kita memahami komunikasi sebagai suatu proses, ada beberapa karakteristik yang membantu kita memahami bagaimana sebenarnya komunikasi berlangsung:

1. Komunikasi itu dinamik. Komunikasi adalah suatu aktivitas yang terus berlangsung dan selalu berubah. Sebagai para pelaku komunikasi, secara konstan kita dipengaruhi oleh pesan orang lain dan sebagai konsekuensinya, kita mengalami perubahan yang terus menerus. Setiap orang dalam hidup sehari-hari bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang dan orang-orang ini mempengaruhi kita. Setiap kali kita terpengaruh, kita berubah, seberapa kecil pun perubahan itu. Itu berarti bahwa kita menjalani hidup ini sebagai orang-orang yang terus menerus berubah-orang-orang dinamik.
2. Komunikasi itu interaktif. Komunikasi terjadi antara sumber dan penerima. Ini mengimplikasikan dua orang atau lebih yang membawa latar belakang dan pengalaman unik mereka masing-masing ke peristiwa komunikasi. Latar belakang dan pengalaman unik mereka tersebut mempengaruhi interaksi mereka. Interaksi juga menandakan situasi timbal balik yang memungkinkan setiap pihak mempengaruhi pihak lainnya. Setiap pihak secara serentak menciptakan pesan yang dimaksudkan untuk memperoleh respon-respon tertentu dari pihak lainnya.
3. Komunikasi bersifat ireversibel, artinya setelah sesuatu dikatakan dan seseorang telah menerima serta menguraikan pesan tersebut, pesan tersebut tidak dapat

dibatalkan lagi dan efeknya tidak dapat dihilangkan sama sekali. Setelah penerima terpengaruh oleh suatu pesan, pengaruh tersebut tidak dapat dibatalkan sepenuhnya.

4. Komunikasi terjadi dalam konteks fisik dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, interaksi itu tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dalam lingkungan fisik tertentu dan dinamika sosial tertentu.

2.1.2 Fungsi Komunikasi

Menurut Sendjaja dalam Bungin (2018:274), suatu organisasi yang bersifat mencari keuntungan atau nirlaba mempunyai empat fungsi organisasi, yaitu fungsi informasi, fungsi pengaturan, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Keempat fungsi tersebut dijelaskan di bawah ini:

1) Fungsi Informasi

Suatu organisasi dapat dianggap sebagai sistem pemrosesan informasi. Artinya, setiap anggota organisasi Anda ingin menerima informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan terkini. Informasi yang Anda peroleh akan membantu semua anggota organisasi Anda melakukan pekerjaan mereka dengan percaya diri. Informasi pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi. Administrator memerlukan informasi untuk membuat kebijakan perusahaan dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam organisasi. Pada saat yang sama, karyawan (bawahan) membutuhkan informasi yang tidak hanya diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya, tetapi juga informasi tentang keamanan, jaminan sosial, asuransi kesehatan, izin, liburan, dll.

2) Fungsi Pengaturan

Fungsi pengaturan ini mengacu pada peraturan yang diterapkan dalam suatu organisasi. Di setiap lembaga atau organisasi, ada dua hal yang memengaruhi fungsi pengaturan ini. Pertama, ada atasan Anda atau mereka yang berada dalam struktur manajemen - orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengendalikan semua informasi yang dikomunikasikan. Mereka juga memiliki wewenang untuk memberikan instruksi dan perintah, dan sering ditempatkan pada tingkat tertinggi (jabatan fungsional) dalam struktur organisasi untuk memastikan bahwa perintah tersebut dilaksanakan dengan benar. Kedua, ada hubungannya dengan pesan. Pesan peraturan terutama berorientasi bisnis. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian hukum tentang peraturan yang berlaku pada pekerjaan yang diizinkan untuk mereka lakukan.

3) Fungsi Persuasi

Ketika memimpin sebuah organisasi, kekuasaan dan wewenang tidak selalu menghasilkan hasil yang Anda harapkan. Melihat kenyataan ini, banyak pemimpin yang lebih suka membujuk bawahannya daripada memberi perintah. Inisiatif oleh karyawan lebih dikenal luas daripada unjuk kekuatan dan kewibawaan manajemen yang terus-menerus.

4) Kemampuan Integrasi

Setiap organisasi berupaya keras menyediakan saluran di mana karyawannya dapat melaksanakan tugas dan melakukan pekerjaan dengan baik. Baik saluran komunikasi formal, seperti publikasi khusus dalam organisasi (bulletin, buletin)

dan laporan tentang kemajuan organisasi, maupun saluran komunikasi informal, seperti percakapan antarribadi selama jam istirahat kerja, pertandingan olahraga, dan kunjungan lapangan. Ada. Kegiatan ini akan mendorong karyawan untuk lebih terlibat dalam perusahaan.

2.1.3 Konsep Komunikasi Politik

Dalam setiap aktivitas manusia selalu membutuhkan komunikasi. Dapat dikatakan bahwa hal komunikasi adalah suatu hal yang sangat mutlak dalam kehidupan konkret setiap manusia. Komunikator dalam sebuah komunikasi selalu terjadi didalam suatu matriks kehidupan sosial. Komunikasi itu pun terjadi di dalam situasi sosial sejak awal mulanya sebuah komunikasi, berkembang sampai berakhirnya, Artinya: relasi antara komunikator dan khalayak atau publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem sosial. Komunikator massa, sebagai organisasi yang menempati posisi penting dan sensitif dalam jaringan sosial, memiliki kekuatan untuk menolak atau menyeleksi informasi sebagai respons terhadap berbagai tekanan yang muncul dalam sistem sosial yang relevan yang sedang berkembang di masyarakat pada suatu waktu tertentu.

Komunikasi politik dapat dilihat sebagai cara membangun citra politik. Kampanye dapat dilakukan oleh calon tertentu, sekelompok orang (tim kampanye), atau partai politik sebagai salah satu bentuk komunikasi politik untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Menurut Arifin (2015), kampanye politik adalah penerapan komunikasi politik yang dilakukan oleh individu, kelompok individu, atau

organisasi politik untuk menciptakan dan menyebarkan citra dan opini publik yang positif guna memenangkan pemilihan umum. Dalam kampanye politik, hal yang paling signifikan adalah tentang pesan atau informasi yang disampaikan oleh para calon kandidat. Untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan kampanye, diperlukan adanya pemberitaan kampanye yang dapat dilakukan melalui media massa.

Parlov (Mufti, 2017) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses dimana para pemimpin, media, dan warga negara suatu negara berbagi dan menumbuhkan pemahaman tentang makna pesan yang terkait dengan kebijakan publik. Ada yang mengartikan komunikasi politik sebagai keseluruhan proses transmisi, pertukaran, dan pencarian informasi (termasuk fakta, opini, keyakinan, dll.) yang dilakukan oleh partisipan dalam aktivitas politik yang dilembagakan.

Komunikasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari dan dipengaruhi oleh budaya politik suatu masyarakat. Pada saat yang sama, komunikasi politik dapat menciptakan, memelihara, dan menyebarkan budaya politik, jadi menganalisis budaya politik suatu masyarakat dengan berfokus pada struktur pesan dan pola komunikasi politik yang diungkapkan di dalamnya. Anda bisa. Menurut Rush dan Althoff dalam Bajari dan Saragi (2017:413), komunikasi politik adalah transfer informasi yang relevan secara politik dari satu bagian sistem politik ke sistem politik lain, dan antara sistem sosial dan politik. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan. Ini adalah elemen dinamis dari sistem politik, dan proses sosialisasi, partisipasi, dan adopsi politik bergantung pada komunikasi.

Adapun tujuan utama dari komunikasi politik adalah mempengaruhi proses politik, seperti pemilihan umum, pengambilan keputusan politik, atau dukungan terhadap kebijakan dan program politik tertentu. Komunikasi politik juga berperan dalam pembentukan citra dan identitas politik, pengelolaan hubungan dengan media, pembentukan koalisi politik, dan mobilisasi massa. Komunikasi politik tidak hanya mencakup pesan yang disampaikan, tetapi juga melibatkan pemilihan media atau saluran komunikasi yang tepat, penyesuaian pesan dengan audiens yang dituju, dan pengelolaan persepsi publik. Aktor-aktor politik dalam komunikasi politik berusaha untuk mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat, memperoleh dukungan, dan membangun hubungan politik yang bermanfaat.

2.1.4 Indikator Komunikasi Politik

Unsur-unsur komunikasi politik tidak berbeda dengan unsur-unsur komunikasi umum. Pada dasarnya, ia terdiri dari komunikator (pengirim pesan), pesan, dan komunikator lain (penerima pesan). Nimmo juga mengkaji komunikasi politik dalam Junaedi (2018:24) yang meliputi unsur-unsur seperti komunikator politik, pesan politik, media politik, khalayak politik, dampak dan hasil politik. Komunikasi politik adalah diskusi politik yang mengandung unsur komunikatif dengan konsekuensi politik tertentu.

a) Komunikator politik

Semua peristiwa komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sosial selalu melibatkan sumber sebagai pembuat informasi atau pengirim informasi itu

sendiri, yang disebut komunikator. Komunikator dalam proses komunikasi politik memainkan peran sebagai pembentuk opini publik. Sedangkan pesan adalah pembicaraan-pembicaraan sebagai proses negosiasi yang bertujuan membentuk pengertian bersama diantara berbagai pihak tentang bagaimana sikap seharusnya yang harus diperankan setiap pihak dan bagaimana bertindak terhadap sesamanya. Hal mendasar menjadi pembahasan dalam komunikasi politik adalah akibat yang ditimbulkan oleh komunikasi politik. Akibat tersebut dapat berbentuk simpati, partisipasi tetapi juga dapat berwujud sinisme, antipasti serta perlawanan politik. Dengan demikian komunikasi politik harus mampu menghasilkan pembentukan dan perubahan sikap positif tetapi dapat juga bermakna negatif bagi komunikator politiknya.

b) Pesan politik

Pesan yang dimaksud adalah sebuah proses yang disampaikan oleh seorang pengirim kepada seorang penerima. Dalam konteks ini, isi dari pesan, dapat berupa sebuah informasi ataupun ilmu pengetahuan, atau berupa hiburan, atau pun nasehat, atau pun juga berupa sebuah propaganda yang hebat dan handal.

Effendi (2016:6) menyatakan bahwa teknologi komunikasi adalah metode atau “seni” yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan sedemikian rupa sehingga menimbulkan efek tertentu bagi penerimanya. Pesan yang disampaikan oleh komunikator merupakan pernyataan yang dimaksudkan untuk mengarahkan pikiran dan perasaan dan dapat berupa ide, informasi, keluhan, keyakinan, himbauan, rekomendasi, dan lain-lain. Di sisi lain, pesan dalam

komunikasi politik dimaksudkan untuk memengaruhi orang lain. Nimmo mengklasifikasikan pesan dalam kegiatan komunikasi politik menjadi tiga kategori: Yang pertama adalah tentang kekuasaan, yaitu tentang memengaruhi orang lain melalui janji dan ancaman. Yang kedua adalah pembahasan tentang pengaruh. Pesan dalam komunikasi politik ditujukan kepada khalayak dengan berbagai cara dan dapat mencakup saran, dorongan, permintaan, peringatan, dan lain-lain. Dan yang ketiga tentang otoritas. Pesan dari pidato yang berwibawa adalah memberi perintah. Diskusi ini mengharuskan hadirin untuk mengembangkan rasa tunduk kepada pemimpin.

c) Media politik

Dalam sebuah komunikasi, media yang dimaksud di sini sebagai alat atau sarana yang selalu digunakan untuk menyampaikan pesan dalam konteks memindahkan sebuah pesan dari sumber atau komunikator kepada penerima. Nimmo (2015:75) mengusulkan tiga jenis media komunikasi yang digunakan dalam kegiatan komunikasi politik: Ada tiga jenis media: media massa, media komunikasi interpersonal, dan media komunikasi organisasi. Saluran komunikasi massa hadir dalam dua bentuk, masing-masing berdasarkan pada keterusterangan komunikasi satu ke orang banyak.

Bentuk yang pertama terdiri atas komunikasi tatap muka seperti bila seorang kandidat politik berbicara di depan rapat umum atau ketika seseorang berbicara di depan khalayak besar atau konferensi pers. Bentuk yang kedua terjadi jika ada perantara ditempatkan diantara komunikator dan khalayak. Di sini media,

teknologi, sarana komunikasi lainnya turut serta. Media cetak dan elektronik memiliki sarana yang berbeda dalam menyebarluaskan informasi.

d) Khalayak politik

Penerima dalam sebuah komunikasi adalah pihak yang akan menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber atau pembuat informasi atau komunikator. Penerima ini bisa saja secara individual, pribadi atau secara kelompok kolegial bersama orang lain. Jadi bisa dalam bentuk kelompok, bisa dalam sebuah partai politik atau pun di dalam sebuah negara. Dalam proses sebuah komunikasi, penerima sebagai elemen yang utama yang bisa menjadi sasaran dari sebuah komunikasi. Nimmo (2015) memberikan pengertian khalayak dengan sejumlah orang yang bertindak atau cenderung bertindak yaitu, dalam berbagai tahap tindakan. Bila didefinisikan sebagai suatu kegiatan, suatu kelompok terdiri atas orang-orang yang melakukan kegiatan yang dipersatukan tanpa menghiraukan apakah yang mendasari kegiatan itu berupa organisasi formal atau tidak formal. Artinya, orang bergabung untuk bertindak dalam proses opini meskipun tidak di organisasi secara formal membentuk kelompok atau opini publik.

e) Efek atau akibat politik

Efek atau pengaruh adalah perbedaan kondisi antara apa yang dipikirkan penerima, apa yang dilakukan penerima, dan apa yang dirasakan oleh penerima pada saat sebelum dan sesudah menerima sebuah pesan, apakah itu terjadi secara pribadi orang per orang atau terjadi secara bersama dan berkelompok. Dalam konteks ini, pengaruh atau efek, bisa terjadi pada sikap, perilaku dan juga

pengetahuan si penerima pesan. Dalam konteks ini juga, pengaruh atau efek dapat juga diartikan sebagai perubahan atau penguatan keyakinan dari si penerima pada pengetahuan, tindakan dan juga perilaku yang dilihat sebagai akibat penerimaan sebuah pesan. Dampak dari semua komunikasi yang ditargetkan memiliki satu tujuan: memengaruhi audiens atau penerima. Pengaruh adalah perbedaan dalam cara penerima berpikir, merasakan, atau bertindak sebelum dan sesudah menerima pesan. Dampak adalah efek dari pesan. Dalam komunikasi pelayanan publik, efek yang diharapkan dari kegiatan komunikasi politik adalah keikutsertaan warga masyarakat dalam menyampaikan saran perbaikan atau kritik.

2.2 Kinerja Pelayanan Publik

2.2.1 Konsep Kinerja

Sumber daya manusia merupakan sasaran dari seluruh kegiatan pemerintahan dan karenanya sumber daya manusia merupakan faktor kunci bagi efisiensi dan efektivitas proses kerja. Aparatur ini merupakan aktor yang menggerakkan mekanisme proses sistem pemerintahan. Oleh karena itu, agar mekanisme pemerintahan dapat berfungsi sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, orang, subjek, atau pelaku juga harus memiliki keterampilan dan kinerja yang baik.

Prawirosentono (2017:2) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi secara

sah untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Ia mengatakan ada. Sesuai dengan hukum, moral dan etika.

Keberhasilan organisasi untuk meningkatkan kinerja sangat tergantung dari seberapa besar kinerja pegawai yang dimiliki, karena unsur pegawailah yang berperan penting yang akan menentukan keberhasilan peningkatan kinerja organisasi. Hal ini disadari bahwa untuk mewujudkan tujuan dari suatu organisasi sangatlah diperlukan kinerja yang baik dari para pegawainya. Dengan kinerja yang tinggi dari para pegawai, maka pelaksanaan tugas akan lebih efektif dan efisien sehingga pegawai dapat mewujudkan tujuan organisasi secara tepat dan cepat. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai diharapkan mampu mewujudkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Kemudian, Nawawi (2018:234) mengatakan bahwa kinerja ialah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik atau material mupun non-fisik atau non material. Dalam penggunaannya di bidang manajemen keorganisasian, istilah (*performance*) ini dipakai untuk menunjukkan atau mengukur pelaksanaan dan hasil kerja (prestasi) yang dicapai oleh seseorang, kelompok atau organisasi menurut ukuran yang berlaku untuk suatu tugas/pekerjaan dan dalam waktu tertentu yang ditentukan.

Dengan demikian, kinerja seorang pegawai baru akan dapat diketahui apabila seseorang menghasilkan suatu pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan bersama. Pembinaan pegawai negeri khususnya pegawai yang ditempat diposisi terdepan dalam memberikan pelayanan publik mutlak dilakukan untuk mewujudkan

citra pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada negara. Konsep kinerja merupakan modifikasi mendasar atau pergeseran paradigma dibandingkan dengan konsep produktivitas. Awalnya, istilah produktivitas sering digunakan untuk menggambarkan kemampuan individu atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Umar dalam Riduwan (2018:412) mengatakan bahwa kinerja dapat diartikan sebagai watak atau semangat fundamental yang menghasilkan produktivitas dan kinerja dari kebiasaan suatu kelompok masyarakat tertentu dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kewajibannya. Dalam organisasi profesional, sebagai bentuk konsekuensi logis dari apa yang telah diberikan kepada organisasi, maka pegawai mendapatkan imbalan atas prestasi yang ditunjukkannya. Sesuatu yang diterima pegawai sebagai balas jasa atas kerja pegawai disebut dengan istilah kompensasi.

2.2.2 Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Tingkat kecanggihan hanya dapat diapresiasi oleh orang yang menyajikan atau menerima makanan. Dalam hal ini, ada komunikasi internal antara kedua pihak dan kepuasan yang dicapai bergantung pada konteks di mana interaksi layanan berlangsung. Jika upaya untuk mencapai kepuasan bersama gagal membangun timbal balik, kesinambungan interaksi berikutnya dapat terganggu.

Moenir (2020:17) mengemukakan bahwa pelayanan merupakan suatu proses dan karenanya pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan. Teori siklus hidup

kepemimpinan menggambarkan kebutuhan dan kinerja manusia sebagai proses layanan yang terjadi setiap hari dan berkelanjutan serta mencakup rentang hidup orang-orang dalam masyarakat. Selanjutnya, Moenir (2020:88) mengatakan bahwa dalam pelayanan umum terdapat faktor-faktor pendukung yang penting, diantaranya faktor sarana kerja, kemudahan faktor sikap, terdiri dari kesopanan/keramahan. Petugas menerima atau mengembangkan tugas dengan ikhlas sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas, hal ini dapat dilihat dari penjelasan aturan yakni kesenangan menerima aturan kemudian kedisiplinan pegawai, pendapatan pegawai dan yang paling penting adalah keterampilan pegawai yang berpengaruh kepada perlunya diklat untuk menambah pengetahuan petugas kemudian yang terakhir adalah faktor mekanisme atau tata cara yakni kejelasan pemberian tugas oleh atasan.

Di sektor publik, masalah pelayanan memainkan peranan penting. Sebab, hal tersebut merupakan masalah kepentingan umum yang diselenggarakan oleh negara dengan seluruh pegawai negeri yang terlibat sebagai pegawai negeri sipil. Pelayanan publik merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan investasi dalam penguatan sumber daya manusia. Hal ini akan berdampak pada produktivitas masyarakat di masa depan, sementara pada saat yang sama layanan publik secara langsung memenuhi kebutuhan dasar, yang merupakan tujuan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat.

Kurniawan dalam Pasolong (2018:199) menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan yang memenuhi kebutuhan orang lain dan masyarakat yang berkepentingan terhadap organisasi, dengan mengikuti aturan dasar dan prosedur yang ditetapkan. Ta. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor 63 Tahun 2004, pelayanan publik kini diartikan sebagai pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, yang merupakan cerminan kewajiban pegawai pemerintah sebagai aparatur sipil negara. Menurut Ratminto dan Winarsih (2018:5), pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan, baik barang publik maupun jasa publik, yang pada hakikatnya diselenggarakan secara terpusat dan bertanggung jawab oleh lembaga negara; penyelenggaranya dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, dan/atau badan usaha milik negara. Di lingkungan lokal, negara bagian, atau perusahaan lokal sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan sosial atau sebagai bagian dari penerapan ketentuan hukum dan peraturan.

Kemudian Mahmudi (2015: 229) menyatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini adalah badan publik, misalnya: (a) unit operasional/unit organisasi kementerian. b) Departemen c) Lembaga Pemerintah Selain Menteri d) Sekretariat Lembaga Negara Tertinggi dan Menengah, misalnya Sekretariat Dewan (Setwan), Sekretariat Negara (Setneg), dan sebagainya. e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

- f) Badan Usaha Milik Negara (BHMN); g) Badan Usaha Milik Daerah (BHMD); dan
(h) badan publik lainnya (termasuk kementerian) di pusat dan daerah.

2.2.3 Indikator Kinerja Pelayanan Publik

Islamy menjelaskan dalam Rohman, et al. (2017:118) mengemukakan beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam mengoptimalkan kinerja birokrasi pelayanan di tingkat daerah. Hal ini juga terkait erat dengan peningkatan situasi internal organisasi. Prinsip-prinsip ini meliputi:

- a) Prinsip aksesibilitas. Kami mengharuskan semua layanan mudah diakses oleh semua pengguna layanan. Ini terkait dengan masalah lokasi, jarak, dan proses pelayanan.
- b) Asas kesinambungan, yaitu upaya mengutamakan jenis pelayanan perlu terus menerus diberikan kepada masyarakat, dengan adanya kepastian dan kejelasan tentang kaidah-kaidah yang mengatur proses pelayanan.
- c) Prinsip teknis. Dengan kata lain, prinsip ini mengacu pada proses penyampaian yang dilakukan oleh personel yang benar-benar memahami aspek teknis penyampaian dan harus berlandaskan pada kejelasan, keamanan dan kestabilan sistem, prosedur dan alat penyampaian.
- d) Prinsip profitabilitas berarti bahwa pelayanan harus diberikan seefektif dan seefisien mungkin, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat luas. Prinsip tanggung jawab. Artinya, karena tugas PNS pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya, maka masyarakat

harus mempertanggungjawabkan proses, produk, dan mutu pelayanan yang diberikannya.

2.3 Pemerintah Desa

Desa adalah suatu kawasan permukiman kolektif atau kesatuan hukum dan kesatuan pemerintahan yang berupa tempat tinggal, beserta tanah garapan, daerah penangkapan ikan, sawah, padang rumput, hutan terbuka, serta mempunyai laut/danau/sungai/irigasi dan tepi gunung. Semua wilayah ini dikuasai oleh hak adat masyarakat desa.

Pemerintahan desa adalah bagian pemerintahan nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di perdesaan. Tata kelola desa merupakan proses memadukan upaya masyarakat desa dan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Surasih, 2016: 23).

Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Menurut PP No. 29 Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Dewan Pertimbangan Desa adalah “lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.” Ditetapkan. Anggota Panitia Musyawarah Desa merupakan wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan, berdasarkan keterwakilan masyarakat setempat yang ditentukan melalui musyawarah dan mufakat (PP No. 72/2005, Pasal 29).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Lembaga ini dapat dianggap sebagai "perlemennya" desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Masih dalam Peraturan Pemerintah ini, pasal 30 (2) menyebutkan bahwa anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lain. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BPD merupakan wadah perwakilan berbagai kepentingan dan kelompok dalam masyarakat desa. Oleh karena itu, BPD menempati posisi penting sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat dan sekaligus berfungsi sebagai mitra kerja bagi pemerintah desa dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pemerintahan dan pembangunan tanpa harus saling membawahi.

2.4 Kerangka Pikir

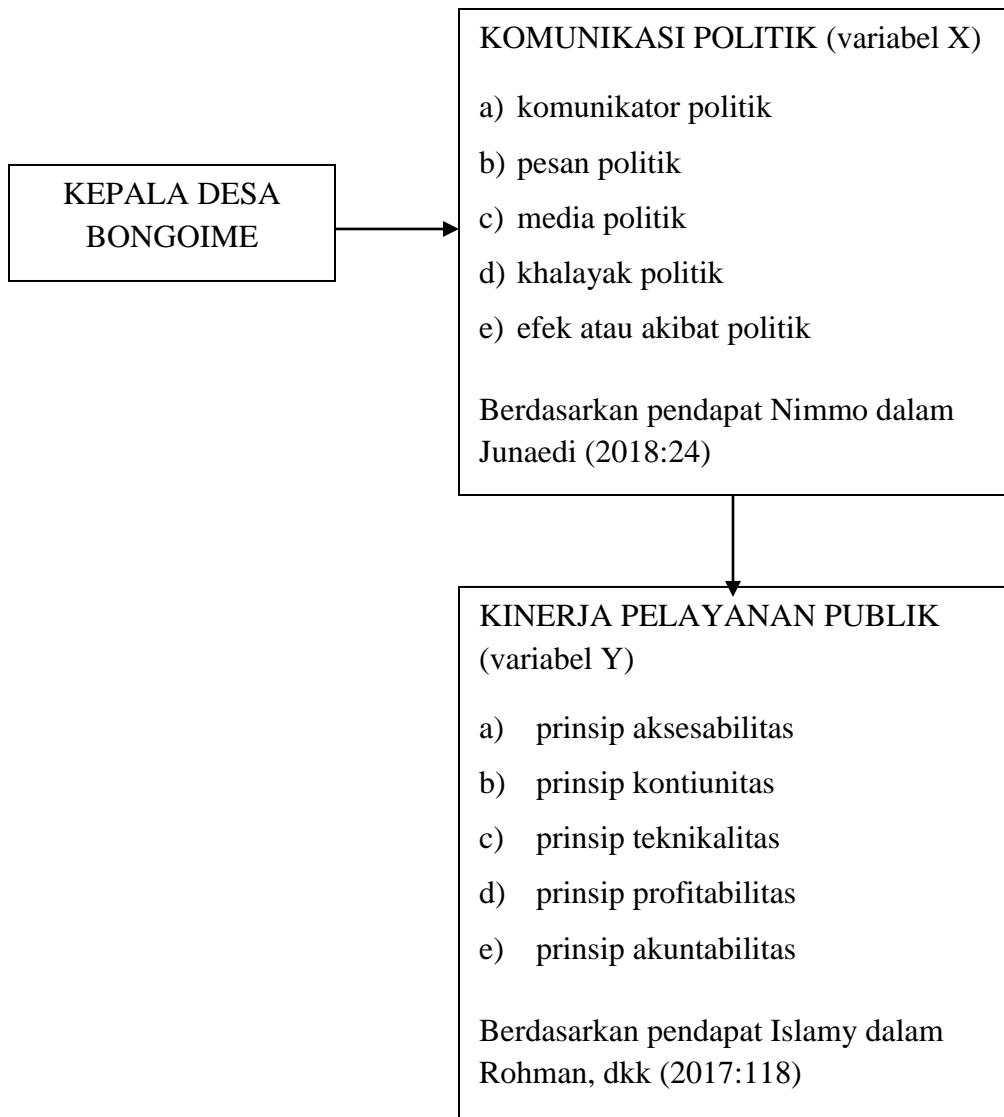
Komunikasi politik merupakan aktivitas seseorang atau pimpinan dalam menyanpaikan pesan kepada orang lain. Seorang kepala desa selaku pimpinan di desanya dapat menggunakan komunikasi politik, baik menggunakan media

komunikasi atau tidak, untuk menyampaikan ide dan gagasannya kepada aparatur desa dan masyarakatnya agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik, dimana ada keterlibatan aparatur desa, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik tersebut, sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan desa yang good government. Komunikasi politik di dalam ranah lokal, terutama dalam desa, memiliki peranan yang sangat vital dalam mengelola pelayanan publik dengan efisien dan berkualitas.

Nimmo dalam Junaedi (2018:24) mengatakan bahwa dalam mengkaji komunikasi politik melibatkan unsur-unsur, yakni: komunikator politik, pesan politik, media politik, khalayak politik, serta efek atau akibat politik. Adapun kinerja pelayanan publik menurut Islamy dalam Rohman, dkk (2017:118) mengatakan bahwa prinsip pokok yang bisa dijadikan pedoman dalam mengoptimalkan kinerja birokrasi pelayanan di tingkat lokal, yakni: a) prinsip aksesibilitas; b) prinsip kontiunitas; c) prinsip teknikalitas; d) prinsip profitabilitas; dan e) prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan hal tersebut, dapat digambarkan skema penelitian sebagai berikut.

Gambar 2.1 bagan kerangkan pemikiran



2.5 Hipotesis

Riduwan (2018:35) mengatakan bahwa hipotesis ialah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Hipotesis dalam penelitian ini ialah:

Ho: Komunikasi politik kepala desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

Ha: Komunikasi politik kepala desa berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka berpikir yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pokok bahasan penelitian ini adalah komunikasi politik kepala desa dan kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Dalam penelitian ini, peneliti diperlukan waktu selama tiga bulan.

3.2 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei, yaitu penelitian dengan menggunakan kata-kata, kalimat dan angka berdasarkan sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Menurut Nasir (2014:65), metode pendekatan penelitian adalah mengekstraksi fakta dari gejala yang ada dan mencari informasi faktual tentang lembaga-lembaga baik sosial, ekonomi, maupun politik suatu kelompok atau daerah.

3.3 Operasionalisasi Variabel

Untuk mengetahui data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu mengoperasionalkan variabel penelitian. Ada dua variabel dalam penelitian ini yaitu komunikasi politik kepala desa (variabel X) dan kinerja

pelayanan (variabel Y). Adapun uraian lebih lanjut tentang operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut:

Komunikasi politik kepala desa ialah penyampaian pesan kepala desa yang diarahkan kepada suatu pencapaian sehingga berpengaruh dalam kegiatan komunikasi sehingga mampu mengikat semua kelompok masyarakat desa. Nimmo dalam Junaedi (2018:24) mengatakan bahwa komunikasi politik melibatkan unsur-unsur, yakni:

- a) komunikator politik
- b) pesan politik
- c) media politik
- d) khalayak politik, serta
- e) efek atau akibat politik

Kinerja pelayanan publik ialah hasil pemberian pelayanan untuk memenuhi keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada pemerintah desa sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Islamy dalam Rohman, dkk (2017:118) mengatakan bahwa prinsip pokok yang bisa dijadikan pedoman dalam kinerja pelayanan, yakni:

- a) prinsip aksesabilitas
- b) prinsip kontiunitas
- c) prinsip teknikalitas
- d) prinsip profitabilitas; dan
- e) prinsip akuntabilitas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.1
Operasionalisasi variabel X dan Y

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Komunikasi politik kepala desa (variabel X) Berdasarkan pendapat Nimmo dalam Junaedi (2018:24)	a) komunikator politik b) pesan politik c) media politik d) khalayak politik, serta e) efek atau akibat	<ul style="list-style-type: none"> - membentuk pengertian bersama diantara aparatur desa dan masyarakat - membentuk opini publik yang positif tentang pelayanan publik - mempengaruhi masyarakat dengan berbagai pesan yang disampaikan - berkomunikasi tatap muka dengan aparatur desa dan warga masyarakat - menggunakan media cetak dan media elektronik dalam menyampaikan informasi - Informasi yang disampaikan kepala desa dapat dipahami oleh warga masyarakat - Masyarakat aktif memberikan 	Likert

	politik	saran dan masukan kepada pemerintah desa	
Kinerja pelayanan publik (variabel Y) Berdasarkan pendapat Islamy dalam Rohman, dkk (2017:118)	<p>a) prinsip aksesabilitas</p> <p>b) prinsip kontiunitas</p> <p>c) prinsip teknikalitas</p> <p>d) prinsip profitabilitas;</p> <p>e) prinsip akuntabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pelayanan publik dapat dijangkau secara mudah - mengedepankan jenis pelayanan secara terus menerus yang tersedia bagi masyarakat - kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan publik - pelayanan publik ditangani oleh aparatur yang memahami secara teknis pelayanan - solusi atau jalan keluar apabila warga masyarakat menghadapi hambatan dalam pelayanan publik - pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien - pelayanan yang diberikan memberikan keuntungan ekonomis dan sosial - proses dan produk pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat - mutu pelayanan yang diterima dapat dipertanggungjawabkan 	Likert

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel, digunakan skala Likert. Kuesioner yang dibuat terdiri dari 5 (lima) pilihan jawaban yakni; selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah.

3.4 Populasi

Menurut Sugiyono (2018:-80), populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan diambil kesimpulannya. Penelitian ini menyangkut komunikasi politik kepala desa dan kinerja pelayanan publik, maka populasi yang ditetapkan masyarakat di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila.

3.5 Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2018:57) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu sampling insidental, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang hanya mengambil sampel yang secara kebetulan ditemui saat membutuhkan pelayanan di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila, selama satu bulan, yakni sebanyak 41 orang.

3.6 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh penulis dari informasi yang diberikan oleh responden di Desa Bongoime, melalui kuesioner yang akan dijawab oleh warga masyarakat yang terpilih menjadi responden.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, maupun arsip, yang dapat mendukung kelengkapan dari data primer yang diambil di Kantor Desa Bongoime.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka dalam penelitian ini digunakan:

1. Kuesioner, yaitu teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan penelitian, dan selanjutnya diberikan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang komunikasi politik dan kinerja pelayanan publik.
2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data, dimana peneliti mengadakan pengamatan secara mendetail terhadap aktivitas komunikasi politik dan kinerja pelayanan di Desa Bongoime.

3.8 Prosedur Penelitian

Untuk memastikan bahwa instrumen atau alat ukur yang digunakan valid dan reliabel, instrumen tersebut harus diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan dan memberikan data yang objektif ketika digunakan.

3.8.1 Uji validitas

Validitas merupakan ukuran derajat ketepatan atau keandalan instrumen yang dimaksud dalam hal kemampuannya mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan mengorelasikan setiap pertanyaan dengan skor total setiap variabel. Selain itu, kami menyediakan interpretasi koefisien korelasi. Untuk mengujinya, digunakan rumus, yakni:

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n\sum X^2) - (\sum X)^2)((n\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

X = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

n = Banyaknya sampel

Selanjutnya dihitung dengan uji t dengan rumus:

$$t \text{ hitung} = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai t hitung

n = Jumlah responden

r = Koefisien korelasi hasil r hitung

Selain itu, angka korelasi yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan diubah menjadi nilai t-Student dan dibandingkan dengan t-tabel pada taraf signifikansi derajat kebebasan terpilih ($n-2$). Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, dianggap valid. Jika t-hitung kurang dari atau sama dengan nilai t-tabel, maka dianggap tidak valid. Sementara itu, tentukan validitas besar pengaruh setiap variabel atau besar kecilnya koefisien korelasi dengan menggunakan interpretasi koefisien korelasi sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Interpretasi koefisien

r	keterangan
0,000 - 0,199	Korelasi sangat rendah
0,200 - 0,399	Korelasi rendah
0,400 - 0,699	Korelasi sedang
0,700 - 0,899	Korelasi Tinggi
0,900 - 1,000	Korelasi sangat tinggi

3.8.2 Uji reliabilitas

Dalam penelitian ini, untuk menguji reliabilitas, digunakan teknik *alfa cronbach (a)*, yang dilakukan untuk jenis data interval (*easy instrument*) yang telah memiliki tingkat keandalan atau reliabilitas yang dapat diterima jika nilai keofisiennya reliabilitas yang terukur adalah variabel $\geq 0,60$ atau 60%.

Rumus yang digunakan yaitu rumus alfa cronbach (a) yaitu :

$$a = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum a^2}{\alpha_1^2} \right)$$

Keterangan:

a = Relibilitas intrument

k = Banyaknya pertanyaan

$\sum a^2$ = Jumlah pertanyaan

a_1^2 = Total varians

3.9 Teknik Analisis Data

3.9.1 Rancangan uji hipotesis

Untuk memastikan apakah terdapat pengaruh komunikasi politik kepala desa terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, maka pengujian dilakukan dengan menggunakan metode regresi sederhana.

Metode regresi sederhana

$$X \longrightarrow Y$$

Keterangan:

X : komunikasi politik kepala desa

Y : kinerja pelayanan publik.

3.9.2 Pengujian hipotesis

Persamaan regresi:

$$\hat{Y} = a + b \cdot X$$

$$\sum Y - b \cdot \sum X$$

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

n

$$n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y$$

$$b = \frac{n \sum X^2 - (\sum X)^2}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan:

X : komunikasi politik kepala desa

Y : kinerja pelayanan publik

a : Nilai konstan atau harga Y jika X = 0

b : Nilai sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai
peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Bongoime

Untuk mengetahui mulai berdirinya dan terbentuknya Desa Bongoime, maka tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya Kecamatan Tilongkabila berdasarkan buku sejarah 5000 tahun yang lampau, dimana seluruh dataran Gorontalo masih digenangi air yang merupakan lautan belaka yang kelihatan pada saat itu hanyalah dua buah gunung, yakni Tilongkabila dan Boliyohuto yang seolah-olah dua buah pulau yang pada saat itu kedua gunung tersebut telah didiami manusia. Pada waktu itu, Pombolohuludu yang merupakan anak dari Puluwidani pada tahun 1272 membongkar batu bata besar yang menopang pelabuhan Gorontalo sekarang ini, maka air yang tergenang merupakan lautan dan berangsur-angsur surut.

Berabad-abad air mengalir kelaut dan akhirnya muncullah dataran yang pertama ialah Bangjo sampai Biloluludu.

Desa Bongoime dibentuk sejak bulan April 2005 yang terdiri atas 4 dusun, yaitu:

- a) Dusun I
- b) Dusun II
- c) Dusun III
- d) Dusun IV

Batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Poowo - Poowo Barat Kecamatan Kabilia, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tunggulo Selatan-Bongohulawa Kecamatan Tilongkabila, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Toto Utara- Berlian – Mootilango Kecamatan Tilongkabila.

4.1.2 Uraian tugas pokok dan fungsi

1. Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- b) Membina kehidupan masyarakat desa dan perekonomian desa
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- e) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- f) Mengajukan raperdes dan bersama BPD menetapkan peraturan desa.
- g) Melaksanakan peraturan desa dan keputusan kepala desa
- h) Menyusun dan menetapkan APBDes setiap tahun dalam peraturan desa.
- i) Menetapkan keputusan kepala desa sebagai peraturan pelaksanaan peraturan desa.
- j) Menyusun program kerja tahunan dan lima tahunan
- k) Menyelenggarakan tertib keuangan desa

- 1) Menyelenggarakan tertib pertanahan, termasuk bondo desa
 - m) Menyelenggarakan tertib administrasi dan pengerajan registrasi desa.
 - n) Menumbuhkan dan mengembangkan semangat gotong-royong masyarakat.
 - o) Mendorong dan mewujudkan usaha-usaha peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
 - p) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait tentang pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan
2. Sekretaris desa
- Sekretaris desa mempunyai tugas:
- a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
 - b) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap kegiatan administrasi yang dilakukan oleh kepala urusan.
 - c) Menyusun rencana, mengumpulkan bahan, merumuskan program dan petunjuk untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - d) Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
3. Kasie pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu sekretaris desa dalam urusan administrasi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban. Adapun tugas dan kewajibannya adalah:

- a) Menyusun rencana dan program penyelenggaraan pemerintahan.

- b) Menyusun rencana dan program pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
 - c) Menyusun rencana dan program pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pertahanan sipil.
 - d) Menyusun rencana dan program pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya.
 - e) Memberikan pelayanan administrasi sekretaris desa.
 - f) Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat didalam urusan pemerintahan.
 - g) Mengerjakan register desa.
 - h) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala desa melalui sekretaris desa secara periodik.
 - i) Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
4. Kasie kesejahteraan
- Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Sekretaris Desa dalam urusan administrasi kesejahteraan sosial. Adapun tugas dan kewajibannya adalah:
- a) Menyusun rencana dan program pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial.
 - b) Menyusun rencana dan program pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan, dan pendidikan masyarakat.

- c) Menyusun rencana dan program kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah.
- d) Memberikan pelayanan administrasi sekretaris desa.
- e) Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di dalam urusan kesejahteraan sosial.
- f) Mengerjakan register desa.
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala desa melalui sekretaris desa secara periodik.
- h) Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan sekretaris desa

5. Kasie pelayanan

Kepala seksi pelayanan mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
- b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
- c) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

4.2. Hasil Penelitian

Sebelum menghitung besarnya pengaruh komunikasi politik kepala desa terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, maka langkah pertama yang harus dilakukan ialah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian. Berikut akan diuraikan hasil pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian tersebut.

4.2.1 Hasil pengujian validitas kuesioner

Skala pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, maka uji validitas kuesioner menggunakan korelasi product moment. Kuesioner dikatakan valid dengan menggunakan kriteria, yakni apabila nilai $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ (r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel}). Kuesioner diuji dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau $\alpha = 0,05$. Lebih jelasnya rekapitulasi hasil uji validitas instrumen dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.1 Hasil pengujian validitas komunikasi politik kepala desa (variabel X) dan kinerja pelayanan publik (variabel Y)

Variabel	pertanyaan	r_{hitung}	$r_{\text{tabel}} = 0,316$	Kesimpulan
komunikasi politik kepala desa (variabel X)	1	0.740	0,316	valid
	2	0.707	0,316	valid
	3	0.772	0,316	valid
	4	0.654	0,316	valid
	5	0.782	0,316	valid
	6	0.762	0,316	valid
	7	0.715	0,316	valid
kinerja pelayanan publik (variabel Y)	1	0.779	0,316	valid
	2	0.601	0,316	valid
	3	0.716	0,316	valid
	4	0.773	0,316	valid
	5	0.437	0,316	valid
	6	0.680	0,316	valid

	7	0,644	0,316	valid
	8	0,637	0,316	valid
	9	0,644	0,316	valid

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Terlihat pada tabel 4.1, hasil perhitungan nilai r_{hitung} untuk komunikasi politik kepala desa (variabel X) yang berisi tujuh pertanyaan, nilai r_{hitung} semuanya menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,316), sehingga disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan diputuskan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Disisi lain, terlihat hasil perhitungan nilai r_{hitung} untuk kinerja pelayanan publik (variabel Y), yang berisi sembilan pertanyaan, nilai r_{hitung} semuanya menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,316), sehingga diputuskan bahwa seluruh pertanyaan diputuskan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

4.2.2 Hasil pengujian reliabilitas kuesioner

Survei diuji keandalannya dengan memberikan skor yang relatif sama kepada responden meskipun mereka menyelesaikan survei pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas kuesioner menggunakan metode cronbach's alpha, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.2. Hasil uji reliabilitas komunikasi politik kepala desa (variabel X) dan kinerja pelayanan publik (variabel Y)

Variabel	Jumlah Pertanyaan	Cronbach's Alpha
komunikasi politik kepala desa (variabel X)	7	0,908
kinerja pelayanan publik (variabel Y)	9	0,893

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Pada tabel 4.2 terlihat bahwa hasil pengujian reliabilitas kinerja pelayanan publik (variabel Y), melalui metode cronbach's alpha, nilainya sebesar 0,893, dengan demikian dapat diputuskan bahwa nilai cronbach's alpha $0,893 > 0,60$, artinya semua pertanyaan kinerja pelayanan publik (variabel Y), disimpulkan reliabel atau terpercaya sebagai pengumpul data dalam penelitian ini.

Disisi lain, terlihat bahwa hasil pengujian reliabilitas komunikasi politik kepala desa (variabel X), melalui metode cronbach's alpha, nilainya sebesar 0,908, dengan demikian dapat diputuskan bahwa nilai cronbach's alpha $0,908 > 0,60$, artinya semua pertanyaan komunikasi politik kepala desa (variabel X), disimpulkan reliabel atau terpercaya sebagai pengumpul data dalam penelitian ini.

4.3. Gambaran Variabel Penelitian

Penelitian ini akan melihat seberapa besar pengaruh komunikasi politik kepala desa terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian, sebagai berikut.

4.3.1. Komunikasi politik kepala desa (variabel X)

Berdasarkan tanggapan responden terhadap kuesioner yang telah diisi oleh 41 responden, setelah diolah diperoleh nilai masing-masing jawaban responden terhadap komunikasi politik kepala desa (variabel X), yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 4.3 Tanggapan responden tentang kepala desa membentuk pengertian bersama diantara aparatur desa dan masyarakat

Pertanyaan 1		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Per센 (%)
Selalu	14	34.1
Sering	20	48.8
Kadang-kadang	4	9.8
Jarang	3	7.3
Tidak pernah	0	0
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai Kepala desa membentuk pengertian bersama diantara aparatur desa dan masyarakat tentang bagaimana sikap seharusnya yang harus diperankan setiap pihak dan bagaimana bertindak terhadap sesamanya dalam pelaksanaan pelayanan publik, dapat diketahui bahwa sebanyak 14 responden (34,1%) menjawab selalu, sebanyak 20 responden (48,8%) menjawab sering, sebanyak 4 responden (9,8%) menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 3 responden (7,3%) menjawab jarang. Hal ini berarti bahwa Kepala desa dapat membentuk pengertian bersama diantara aparatur desa dan masyarakat tentang bagaimana sikap seharusnya yang harus diperankan setiap pihak dan bagaimana bertindak terhadap sesamanya dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Tabel 4.4 Tanggapan responden tentang kepala desa membentuk opini publik yang positif tentang pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa

Pertanyaan 2		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Per센 (%)
Selalu	16	39.0
Sering	18	43.9
Kadang-kadang	7	17.1
Jarang	0	0
Tidak pernah	0	0
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai kepala desa membentuk opini publik yang positif tentang pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa, dapat diketahui bahwa sebanyak 16 responden (39,0%) menjawab selalu, sebanyak 18 responden (43,9%) menjawab sering, dan sebanyak 7 responden (17,1%) menjawab kadang-kadang. Hal ini berarti bahwa kepala desa dapat membentuk opini publik yang positif tentang pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa.

Tabel 4.5 Tanggapan responden tentang kepala desa mempengaruhi masyarakat dengan berbagai pesan yang disampaikan, seperti memberi nasehat dan peringatan

Pertanyaan 3		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Per센 (%)
Selalu	18	43.9
Sering	20	48.8
Kadang-kadang	2	4.9
Jarang	1	2.4
Tidak pernah	0	0
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai kepala desa mempengaruhi masyarakat dengan berbagai pesan yang disampaikan, seperti memberi nasehat dan peringatan, dapat diketahui bahwa sebanyak 18 responden (43,9%) menjawab selalu, sebanyak 20

responden (48,8%) menjawab sering, sebanyak 2 responden (4,9%) menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menjawab jarang. Hal ini berarti bahwa kepala desa dapat mempengaruhi masyarakat dengan berbagai pesan yang disampaikan, seperti memberi nasehat dan peringatan.

Tabel 4.6 Tanggapan responden tentang kepala desa berkomunikasi tatap muka dengan aparatur desa dan warga masyarakat tentang berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik

Pertanyaan 4		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Per센 (%)
Selalu	16	39.0
Sering	16	39.0
Kadang-kadang	8	19.5
Jarang	1	2.4
Tidak pernah	0	0
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai kepala desa berkomunikasi tatap muka dengan aparatur desa dan warga masyarakat tentang berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik, dapat diketahui bahwa sebanyak 16 responden (39,0%) menjawab selalu, sebanyak 16 responden (39,0%) menjawab sering, sebanyak 8 responden (19,5%) menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menjawab jarang. Hal ini berarti bahwa kepala desa sudah berkomunikasi tatap muka dengan aparatur desa dan warga masyarakat tentang berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik.

Tabel 4.7 Tanggapan responden tentang kepala desa menggunakan media cetak dan media elektronik dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik di desa

Pertanyaan 5		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Persen (%)
Selalu	14	34.1
Sering	18	43.9
Kadang-kadang	5	12.2
Jarang	3	7.3
Tidak pernah	1	2.4
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai kepala desa menggunakan media cetak dan media elektronik dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik di desa, dapat diketahui bahwa sebanyak 14 responden (34,1%) menjawab selalu, sebanyak 18 responden (43,9%) menjawab sering, sebanyak 5 responden (12,2%) menjawab kadang-kadang, sebanyak 3 responden (7,3%) menjawab jarang, dan 1 responden (2,4%) menjawab tidak pernah. Hal ini berarti bahwa kepala desa sudah menggunakan media cetak dan media elektronik dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik di desa

Tabel 4.8 Tanggapan responden tentang informasi yang disampaikan kepala desa, baik melalui komunikasi tatap muka, media cetak dan media elektronik, dapat dipahami oleh warga masyarakat

Pertanyaan 6		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Persen (%)
Selalu	11	26.8
Sering	17	41.5
Kadang-kadang	11	26.8
Jarang	1	2.4
Tidak pernah	1	2.4
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai informasi yang disampaikan kepala desa, baik melalui komunikasi tatap muka, media cetak dan media elektronik, dapat dipahami oleh warga masyarakat, dapat diketahui bahwa sebanyak 11 responden (26,8%) menjawab selalu, sebanyak 17 responden (41,5%) menjawab sering, sebanyak 11 responden (26,8%) menjawab kadang-kadang, sebanyak 1 responden (2,4%) menjawab jarang, dan 1 responden (2,4%) menjawab tidak pernah. Hal ini berarti bahwa informasi yang disampaikan kepala desa, baik melalui komunikasi tatap muka, media cetak dan media elektronik, dapat dipahami oleh warga masyarakat

Tabel 4.9 Tanggapan responden tentang masyarakat aktif memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang mereka terima, karena kegiatan komunikasi kepala desa

Pertanyaan 7		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Per센 (%)
Selalu	11	26.8
Sering	15	36.6
Kadang-kadang	12	29.3
Jarang	2	4.9
Tidak pernah	1	2.4
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai masyarakat aktif memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang mereka terima, karena kegiatan komunikasi kepala desa, dapat diketahui bahwa sebanyak 11 responden (26,8%) menjawab selalu, sebanyak 15 responden (36,6%) menjawab sering, sebanyak 2 responden (4,9%) menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menjawab jarang. Hal ini berarti bahwa kepala desa masyarakat aktif memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa tentang

penyelenggaraan pelayanan publik yang mereka terima, karena kegiatan komunikasi kepala desa.

4.3.2. Kinerja pelayanan publik (variabel Y)

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan sembilan (9) pertanyaan untuk mengukur variabel kinerja pelayanan publik, melalui kuesioner kepada responden sebanyak 41 orang. Adapun hasilnya sebagai berikut.

Tabel 4.10 Tanggapan responden tentang pelayanan publik dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan, baik menyangkut tempat, jarak dan prosedur pelayanan

Pertanyaan 1		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Per센 (%)
Selalu	17	41.5
Sering	18	43.9
Kadang-kadang	6	14.6
Jarang	0	0
Tidak pernah	0	0
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai pelayanan publik dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan, baik menyangkut tempat, jarak dan prosedur pelayanan, dapat diketahui bahwa sebanyak 17 responden (41,5%) menjawab selalu, sebanyak 18 responden (43,9%) menjawab sering, dan sebanyak 6 responden (14,6%) menjawab kadang-kadang. Hal ini berarti pelayanan publik dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan, baik menyangkut tempat, jarak dan prosedur pelayanan.

Tabel 4.11 Tanggapan responden tentang pemerintah desa mengedepankan jenis pelayanan secara terus menerus yang tersedia bagi masyarakat

Pertanyaan 2		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Persen (%)
Selalu	20	48.8
Sering	17	41.5
Kadang-kadang	4	9.8
Jarang	0	0
Tidak pernah	0	0
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai pemerintah desa mengedepankan jenis pelayanan secara terus menerus yang tersedia bagi masyarakat, dapat diketahui bahwa sebanyak 20 responden (48,8%) menjawab selalu, sebanyak 17 responden (41,5%) menjawab sering, dan sebanyak 4 responden (9,8%) menjawab kadang-kadang. Hal ini berarti pemerintah desa sudah mengedepankan jenis pelayanan secara terus menerus yang tersedia bagi masyarakat.

Tabel 4.12 Tanggapan responden tentang terdapat kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan publik yang diterima warga masyarakat

Pertanyaan 3		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Persen (%)
Selalu	20	48.8
Sering	17	41.5
Kadang-kadang	4	9.8
Jarang	0	0
Tidak pernah	0	0
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai terdapat kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan publik yang diterima warga masyarakat, dapat

diketahui bahwa sebanyak 20 responden (48,8%) menjawab selalu, sebanyak 17 responden (41,5%) menjawab sering, dan sebanyak 4 responden (9,8%) menjawab kadang-kadang. Hal ini berarti terdapat kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan publik yang diterima warga masyarakat.

Tabel 4.13 Tanggapan responden tentang proses pelayanan publik ditangani oleh aparatur yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan

Pertanyaan 4		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Persen (%)
Selalu	17	41.5
Sering	18	43.9
Kadang-kadang	4	9.8
Jarang	2	4.9
Tidak pernah	0	0
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai proses pelayanan publik ditangani oleh aparatur yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan, dapat diketahui bahwa sebanyak 17 responden (41,5%) menjawab selalu, sebanyak 18 responden (43,9%) menjawab sering, sebanyak 4 responden (9,8%) menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 2 responden (4,9%) menjawab jarang. Hal ini berarti proses pelayanan publik sudah ditangani oleh aparatur yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan.

Tabel 4.14 Tanggapan responden tentang aparatur dapat memberikan solusi atau jalan keluar apabila warga masyarakat menghadapi hambatan dalam pelayanan publik

Pertanyaan 5		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Persen (%)
Selalu	11	26,8
Sering	25	61,0
Kadang-kadang	4	9,8
Jarang	1	2,4
Tidak pernah	0	0
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai aparatur dapat memberikan solusi atau jalan keluar apabila warga masyarakat menghadapi hambatan dalam pelayanan publik, dapat diketahui bahwa sebanyak 11 responden (26,8%) menjawab selalu, sebanyak 25 responden (61,0%) menjawab sering, sebanyak 4 responden (9,8%) menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menjawab jarang. Hal ini berarti aparatur sudah dapat memberikan solusi atau jalan keluar apabila warga masyarakat menghadapi hambatan dalam pelayanan publik

Tabel 4.15 Tanggapan responden tentang pelayanan se bisa mungkin dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

Pertanyaan 6		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Persen (%)
Selalu	18	43,9
Sering	18	43,9
Kadang-kadang	4	9,8
Jarang	1	2,4
Tidak pernah	0	0
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai pelayanan sebisa mungkin dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dapat diketahui bahwa sebanyak 18 responden (43,9%) menjawab selalu, sebanyak 18 responden (43,9%) menjawab sering, sebanyak 4 responden (9,8%) menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menjawab jarang. Hal ini berarti pelayanan sudah sebisa mungkin dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

Tabel 4.16 Tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan aparatur desa memberikan keuntungan ekonomis dan sosial bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas

Pertanyaan 7		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Per센 (%)
Selalu	16	39.0
Sering	17	41.5
Kadang-kadang	6	14.6
Jarang	2	4.9
Tidak pernah	0	0
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai pelayanan yang diberikan aparatur desa memberikan keuntungan ekonomis dan sosial bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas, dapat diketahui bahwa sebanyak 16 responden (39,0%) menjawab selalu, sebanyak 17 responden (41,5%) menjawab sering, sebanyak 6 responden (14,6%) menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 2 responden (4,9%) menjawab jarang. Hal ini berarti pelayanan yang diberikan aparatur desa sudah memberikan keuntungan ekonomis dan sosial bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.

Tabel 4.17 Tanggapan responden tentang proses dan produk pelayanan yang telah diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Pertanyaan 8		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Persen (%)
Selalu	15	36.6
Sering	19	46.3
Kadang-kadang	5	12.2
Jarang	2	4.9
Tidak pernah	0	0
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai proses dan produk pelayanan yang telah diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dapat diketahui bahwa sebanyak 15 responden (36,6%) menjawab selalu, sebanyak 19 responden (46,3%) menjawab sering, sebanyak 5 responden (12,2%) menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 2 responden (4,9%) menjawab jarang. Hal ini berarti proses dan produk pelayanan yang telah diberikan sudah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tabel 4.18 Tanggapan responden tentang mutu pelayanan yang diterima warga masyarakat dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan dan masyarakat

Pertanyaan 9		
Jawaban pilihan	Frekuensi	Persen (%)
Selalu	16	39.0
Sering	17	41.5
Kadang-kadang	6	14.6
Jarang	2	4.9
Tidak pernah	0	0
Jumlah	41	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tanggapan responden mengenai mutu pelayanan yang diterima warga masyarakat dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan dan masyarakat, dapat diketahui bahwa sebanyak 16 responden (39,0%) menjawab selalu, sebanyak 17 responden (41,5%) menjawab sering, sebanyak 6 responden (14,6%) menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 2 responden (4,9%) menjawab jarang. Hal ini berarti mutu pelayanan yang diterima warga masyarakat sudah dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan dan masyarakat.

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis

Langkah pertama dalam uji statistik yakni mengetahui korelasi atau hubungan antara kedua variabel, yakni komunikasi politik kepala desa dan kinerja pelayanan publik. Uji korelasi merupakan metode evaluasi statistik yang digunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel yang diukur. Berikut hasil analisis korelasi terhadap tata hubungan dan tingkat pengaruh antara kedua variabel penelitian.

Tabel 4.19 Hasil uji korelasi

	Kinerja pelayanan publik (variabel Y)	Komunikasi politik kepala desa (variabel X)
Pearson Correlation		
Kinerja pelayanan publik (variabel Y)	1.000	.815
Komunikasi politik kepala desa (variabel X)	.815	1.000
Sig. (1-tailed)	Kinerja pelayanan publik (variabel Y)	.
		.000

	Komunikasi politik kepala desa (variabel X)	.000	.
N	Kinerja pelayanan publik (variabel Y)	41	41
	Komunikasi politik kepala desa (variabel X)	41	41

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Berdasarkan hasil uji korelasi menggunakan komputer dengan bantuan software SPSS versi 21.00 didapatkan besaran korelasi yakni $r = 0,815$, dengan tingkat signifikansi 0,05 dan jumlah N atau sampel sebesar 41 orang. Dengan demikian, besarnya nilai keeratan hubungan (korelasi) antara komunikasi politik kepala desa terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango yakni 0,815 (81,5%).

Selanjutnya dilakukan pengujian regresi sederhana, dimana hasil penelitian dengan uji regresi sederhana didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.20 Model summary komunikasi politik kepala desa (variabel X) terhadap kinerja pelayanan publik (variabel Y)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.815 ^a	.664	.656	2.99165	1.469

a. Predictors: (Constant), Komunikasi politik kepala desa (variabel X)

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa R ialah 0,815 yang berarti nilai korelasi atau hubungan antara komunikasi politik kepala desa (variabel X) terhadap kinerja pelayanan publik (variabel Y) yakni sebesar 0,815 (81,5%). Adapun nilai R Square (r^2) yakni 0,664. Nilai ini mempunyai makna bahwa pengaruh komunikasi politik

kepala desa terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango yakni sebesar 0,664 (66,4%).

Selanjutnya, untuk mengetahui model regresi, maka diperlukan uji hipotesis. Uji hipotesis tersebut dengan melihat angka signifikansinya pada tabel coefficients correlations, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.21 Koefisien korelasi komunikasi politik kepala desa (variabel X) terhadap kinerja pelayanan publik (variabel Y)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.386	2.779		5.176	.000
Komunikasi politik kepala desa (variabel X)	.841	.096	.815	8.788	.000

a. Dependent Variable: Kinerja pelayanan publik (variabel Y)

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025

Pada tabel 4.21, menunjukkan bahwa persamaan regresi sederhana hasil penelitian ini, sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b \cdot X$$

$$\hat{Y} = 14,386 + 0,841 \cdot X$$

Persamaan struktural tersebut berarti bahwa konstanta sebesar 14,386 bermakna bahwa, jika tidak ada kenaikan nilai dari komunikasi politik kepala desa (variabel X), maka nilai kinerja pelayanan publik (variabel Y) adalah 14,386. Koefisien regresi sebesar 0,841 mengatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) satu skor atau nilai komunikasi politik kepala desa (variabel X) akan memberikan kenaikan skor

sebesar 0,841. Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel kinerja pelayanan publik (variabel Y). Kriteria uji koefisien regresi dari komunikasi politik kepala desa (variabel X) terhadap kinerja pelayanan publik (variabel Y), adalah sebagai berikut:

Hipotesis yang diajukan dalam bentuk kalimat.

Ho: Komunikasi politik kepala desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

Ha: Komunikasi politik kepala desa berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi regresi sederhana, bandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas *Sig* sebagai berikut.

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* atau ($0,05 \leq \text{Sig}$), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.
- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* atau ($0,05 \geq \text{Sig}$), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.

Keputusan pengujian:

Terlihat bahwa kolom *Sig* (signifikansi) pada tabel 4.21 coefficients variabel YX ternyata nilai probabilitas *Sig* = 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,05 > 0,000$, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya koefisien regresi adalah signifikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa :

Ha: Komunikasi politik kepala desa berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango., diterima.

4.5. Pembahasan

Berkaitan dengan pelayanan publik, Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik, tentulah para pegawainya dituntut mampu menunjukkan kinerja pelayanannya agar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan Publik merupakan suatu pelayanan terhadap masyarakat, baik jasa maupun non jasa yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya. Kinerja pelayanan publik yang baik menjamin keberhasilan pelayanan tersebut, begitu pun sebaliknya. Keadaan ini menyebabkan setiap organisasi publik berusaha meningkatkan kualitas pelayanan terbaik sebagai upaya mendekatkan jarak antara masyarakat dan pemerintah.

Tinggi rendahnya kinerja pelayanan publik sangat ditentukan oleh kepribadian pegawai itu sendiri. Model pelayanan yang tanggap, akurat, simpatik, penampilan yang sopan dan ramah serta memberikan suatu jaminan merupakan model pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat. Sebuah pelayanan publik dinilai bertanggung jawab apabila dilandasi dengan tata nilai yang jelas-jelas membela kepentingan masyarakat luas. Untuk keperluan penilaian ini proses pengembangan setiap bentuk pelayanan

harus di awali dengan perumusan visi dan misi yang tepat serta kemampuan dari aparatur pemerintah tersebut. Pada hakekatnya pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat desa yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah desa sebagai abdi masyarakat. Dengan demikian, kinerja pelayanan sektor publik merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka reformasi administrasi pemerintahan di desa, dan ini adalah merupakan kunci keberhasilan sehingga menumbuhkan kepercayaan publik atau masyarakat pada pemerintahannya.

Pemerintah Desa Bongoime memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakatnya, tentunya memiliki tanggungjawab utama dalam memberikan pelayanan-pelayanan dasar kepada warga masyarakatnya, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya, dimana pelayanan tersebut harus tersedia dan terjangkau oleh masyarakatnya. Olehnya itu, pemerintah Desa Bongoime harus mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya dan bertindak secara proaktif untuk memenuhiinya, dengan melakukan komunikasi politik. Ummah (2023) mengatakan bahwa komunikasi politik di dalam ranah lokal, terutama dalam desa, memiliki peranan yang sangat vital dalam mengelola pelayanan publik dengan efisien dan berkualitas.

Komunikasi politik pemerintah Desa Bongoime, bukan hanya menyangkut penyampaian informasi semata, melainkan juga melalui komunikasi politik ini, juga

akan dapat memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses keputusan di tingkat desa. Selain itu, komunikasi politik pemerintah Desa Bongoime juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka tentang kegiatan dan anggaran pemerintah desa, masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintahannya dan memastikan penggunaan sumber daya publik secara efisien dan adil. Jika hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Desa Bongoime, tentunya bukan hanya dapat membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, akan tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan dan legitimasi pemerintahan desa di mata masyarakatnya.

Hasil penelitian di Desa Bongoime menunjukkan bahwa komunikasi politik kepala desa memiliki pengaruh terhadap kinerja pelayanan publik sebesar 0,664 (66,4%). Pengaruh ini termasuk kategori sedang apabila dikonsultasikan pada tabel 3.1 interpretasi koefisien korelasi. Ini menunjukkan bahwa komunikasi politik kepala Desa Bongoime belum begitu maksimal dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik aparatur pemerintah Desa Bongoime. Menurut Febriantoro dan Kristanto (2024:27), peningkatan komunikasi internal akan meningkatkan kinerja karyawan. Komunikasi yang buruk merupakan hasil dari hubungan interpersonal yang buruk yang memengaruhi cara orang berperilaku dan berkomunikasi dalam suatu organisasi atau lembaga. Menurut Simbolon dan Ivanna (2024) hal ini tentunya bermanfaat bagi para pemimpin desa karena melalui komunikasi yang efektif,

pemerintah desa dapat memberikan informasi tentang program dan kebijakan yang dijalankan serta merespon keinginan dan kebutuhan masyarakat. hal ini perlu menjadi perhatian. Ini akan membantu membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan desa.

Aparatur pemerintah desa sebagai unsur utama pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat, selalu dituntut untuk mampu berkinerja tinggi dalam posisinya sebagai pelayan masyarakat yang tidak bersifat orientasi keuntungan, melainkan adanya misi khusus yang perlu diwujudkan, yaitu keadilan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Aparatur yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan pada hakikatnya adalah abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat berarti sebagai pelaksana umum tugas tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan segenap lapisan masyarakat, sesuai dengan bidang tugasnya, masing-masing dan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif.

Pemerintah Desa Bongoime dalam tugasnya sehari-hari, senantiasa dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam bentuk pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat, terutama menyangkut kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan tersebut. Untuk itu, Kepala Desa Bongoime berupaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan pemerintah Desa Bongoime dalam mencapai, tujuannya tidak terlepas

dari terjalinya komunikasi yang baik. Hamali mengatakan komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi membuat setiap orang lebih mudah menyelesaikan tugas yang diberikan. Oleh karena itu, pimpinan harus mampu berkomunikasi secara efektif saat memberikan instruksi, arahan, memotivasi bawahan, dan menjalankan fungsi pengawasan. Komunikasi tersebut tidak hanya terjadi antara atasan dan bawahan saja, tetapi juga antar rekan kerja, sehingga setiap karyawan berpotensi untuk dapat berfungsi dengan baik (Fransiska dan Tupti, 2020:225). Hal ini sangat tidak diinginkan karena dapat memengaruhi kinerja. Ada banyak tugas yang perlu diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, tetapi kurangnya komunikasi dapat mengakibatkan tugas tidak selesai dalam jangka waktu yang ditentukan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2017) menyimpulkan bahwa komunikasi berhubungan erat dengan kinerja. Jika komunikasi ini tidak lancar, kesalahpahaman dapat timbul dan memengaruhi pekerjaan anggota.

Dalam sebuah komunikasi politik, kehadiran kepala desa selaku figur yang tentunya memiliki kewenangan dan popularitas, dapat digunakan secara efektif untuk mempengaruhi masyarakat. Pentingnya komunikasi dalam setiap pelaksanaan berbagai kegiatan atau kerja suatu organisasi, akan menjelma menjadi penentu dalam peneilaian keefektifan dan efisiensi dari organisasi pemerintahan desa. Komunikasi menunjukkan apakah organisasi tersebut telah berhasil mencapai suatu target yang telah ditentukan dan disepakati terlebih dahulu, khususnya dalam upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime. Komunikasi

politik terdiri dari aktor politik dan pesan politik yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan semua kebijakan pemerintah. Komunikasi ini terjadi dalam perilaku politik yang kompleks. Kompleksitas komunikasi politik berjalan dalam proses politik yang selalu unik dan strategis dari seorang komunikator melalui pesan dan media.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, dapat ditarik kesimpulan, yakni:

Komunikasi politik kepala desa berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime sebesar 0,664 (66,4%). Pengaruh ini termasuk kategori sedang yang menunjukkan bahwa komunikasi politik Kepala Desa Bongoime belum begitu maksimal dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik aparatur pemerintah Desa Bongoime. Masih kurang maksimalnya komunikasi politik Kepala Desa Bongoime, dikarenakan beberapa indikator komunikasi politik kepala desa, masih kurang mendapat tanggapan maksimal, seperti kepala desa kurang maksimal membentuk opini publik yang positif tentang pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa, masih kurang maksimal berkomunikasi tatap muka dengan aparatur desa dan warga masyarakat tentang berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik, informasi yang disampaikan kepala desa, baik melalui komunikasi tatap muka, media cetak dan media elektronik, masih kurang dapat dipahami oleh warga masyarakat, dan masyarakat kurang aktif memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang mereka terima.

5.2 Saran

Berdasar kesimpulan penelitian, dapat diberikan saran yakni:

- 1) Kepala Desa Bongoime lebih memaksimalkan lagi komunikasi politiknya dengan melakukan komunikasi tatap muka dengan aparatur desa dan warga masyarakat tentang berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik. Komunikasi tatap muka kepala desa dapat mengurangi ketidakpahaman sebagian masyarakat tentang informasi terkait pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Desa Bongoime.
- 2) Kepala Desa Bongoime sebaiknya memberikan pelatihan teknis terkait pekerjaan aparatur pemerintah desa, pelatihan tersebut dapat dilaksanakan baik dalam hal bekerja maupun melayani masyarakat, serta dalam hal penguasaan terhadap peralatan penunjang kerja, seperti komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Syubhan, dkk. 2023. Komunikasi Politik. Widina Media Utama. Bandung.
- Ali, K., dan Saputra, A. 2020. Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614.
- Arifin, Anwar. 2015. Perspektif Ilmu Politik. Rajawali Pers. Jakarta.
- Bajari, Atwar dan Saragih, S. Sahala Tua. 2017. Komunikasi Kontekstual Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Bungin, Burhan. 2018. Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Cangara, H. 2019. Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Effendi, Onong Uchyana. 2016. Dinamika Komunikasi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Eko, S. 2014. Desa Membangun Indonesia. FPPD. Yogyakarta.
- Febriantoro, Andreas Tri, dan Kristanto, Heru. 2024. Pengaruh Komunikasi Internal Terhadap Kinerja Pelayanan Fungsionaris Gereja Kristen Jawa Klampok. *MSDJ : Management Sustainable Development Journal Volume 6 Nomor 1 Tahun 2024*.
- Fransiska, Yuliana, dan Tupti, Zulaspan. 2020. Pengaruh Komunikasi, Beban Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *MANEGGGIO: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, volume 3, Nomor 2 , September 2020
- Mahmudi, 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Moenir. H.A.S. 2020. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mufti, Muslim. 2017. Teori-Teori Politik. Pustaka Media. Bandung.

- Mulyana, Deddy, dan Rakhmat, Jalaluddin. 2018. Komunikasi Antar Budaya : Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nasir, Mohammad. 2014. Metode Penelitian. Ghalia. Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nimmo, Dan. 2015. Komunikasi Politik Komunikator Pesan Media. Granit. Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. 2018. Kepemimpinan Birokrasi. Alfabeta. Bandung.
- Prawirosentono, Suyadi. 2017. Manajemen sumber Daya Manusia. Kiat membangun Organisasi Kompetitif menjelang Perdagangan Bebas Dunia. BPFE. Yogyakarta.
- Ratminto, dan Winarsih, Atik Septi. 2018. Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Riduwan. 2018. Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Alfabeta. Bandung.
- Rohman, Ahmad Ainur, dkk. 2017. Reformasi Pelayanan Publik. Averroes Press. Malang.
- Simbolon, Putri Amelia, dan Ivanna, Julia. 2024. Komunikasi Politik Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Masyarakat Raya Palka Sindangsari. Journal on Education, Volume 06, No. 04 Mei-Agustus 2024, hal. 22327-22338.
- Surasih, Maria Eni., 2016. Pemerintah Desa dan Implementasinya. Jakarta.
- Ulfa, N. U. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Unit Dermaga Kertapati Palembang. Jurnal Ecoment Global, 2(1), 12–26.
- Umam, Khaerul. 2019. Perilaku Organisasi. Pustaka Setia. Bandung.

Ummah, A. M. 2023. Strategi Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance.

Dokumen:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kemendagri. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sekretariat Negara RI. Jakarta.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 160/PIP/B.04/LP-UIG/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Desa Bongoime

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Teukum Muhamad Hikmat Nursalim
NIM : S2121014
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Pengaruh Komunikasi Politik Kepala Desa Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango
Lokasi Penelitian : Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 29/10/2024

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KECAMATAN TILONGKABILA
DESA BONGOIME

SURAT KETERANGAN
NO : 145/BGM-TKBL/148/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

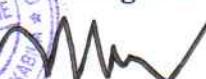
Nama : **SIMSON PANIGORO, SE**
Jabatan : Kepala Desa Bongoime
Alamat : Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila
Kabupaten Bone Bolango

Menerangkan kepada :

Nama : **TEUKU MUHAMAD HIKMAT NURSALIM**
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 12 Juni 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kel. Padebuolo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo
Maksud : Melaksanakan Pengambilan Data dalam penyusunan Skripsi
Judul : “Pengaruh Komunikasi Politik Kepala Desa Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango”

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Desa Bongoime Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango pada Tanggal 14 - 18 November Tahun 2024.

Demikian surat keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya.

Bongoime, 27 Februari 2025
Kepala Desa Bongoime

SIMSON PANIGORO, SE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 050/FISIP-UNISAN/S-BP/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SwastianiDunggio,S.I.P.,M.Si
NIDN : 0930048307
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : TEUKU MUHAMAD HIKMAT NURSALIM
NIM : S2121014
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pengaruh KomunikasiPolitik KepalaDesa Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolang

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **19%** berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI**

dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dekan,


Dr. Mohammad Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si
NIDN. 0913027101

Gorontalo, 10 Maret 2025
Tim Verifikasi,


Swastiani Dunggio,S.I.P.,M.Si
NIDN. 0930048307

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

FISIP03 Unisan

Teuku Nurhikmat Pengaruh Komunikasi Politik Kepala Desa Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Desa Bongoime Kecam...

 ILMU PEMERINTAHAN 1-2024

 Fak. Ilmu Sosial & Politik

 LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3160592261

66 Pages

Submission Date

Feb 20, 2025, 10:40 AM GMT+7

10,866 Words

Download Date

Feb 20, 2025, 10:48 AM GMT+7

72,312 Characters

File Name

SKRIPSI_TEUKU_SALIMcek_turnitin1_1.docx

File Size

178.4 KB

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
 - ▶ Quoted Text
-

Top Sources

0%	 Internet sources
13%	 Publications
15%	 Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 0% Internet sources
13% Publications
15% Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Type	Source	Percentage
1	Publication	Putri Amelia Simbolon, Julia Ivanna. "Komunikasi Politik Pemerintahan Desa dala..."	2%
2	Student papers	Universitas Pendidikan Indonesia	1%
3	Publication	Aida Fitriani. "ADMINISTRASI PELAYANAN KARTU KUNING (AK 1) PADA DINAS TEN..."	1%
4	Student papers	LL Dikti IX Turnitin Consortium	1%
5	Student papers	iGroup	<1%
6	Student papers	Sriwijaya University	<1%
7	Student papers	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	<1%
8	Student papers	Universitas Mulawarman	<1%
9	Publication	syamsul bahri. "Pendekatan Dan Strategi Pengembangan Sistem Pertanian Terin..."	<1%
10	Publication	Muchsinin Muchsinin. "EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA ERA DI..."	<1%
11	Student papers	IAIN Kudus	<1%

12	Student papers	
Universitas Jenderal Soedirman		<1%
13	Student papers	
Gyeongsang National University		<1%
14	Student papers	
Southville International School and Colleges		<1%
15	Student papers	
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)		<1%
16	Student papers	
Universitas Islam Bandung		<1%
17	Student papers	
Universitas PGRI Palembang		<1%
18	Student papers	
Academic Library Consortium		<1%
19	Publication	
Munawaroh Munawaroh, Mohammad Emnis Anwar. "THE RELATIONSHIP OF THE ...		<1%
20	Student papers	
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang		<1%
21	Student papers	
Universitas Sebelas Maret		<1%
22	Student papers	
LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV		<1%
23	Publication	
Mega Veronika, Abang Zainudin. "PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN B..."		<1%
24	Publication	
Christo Vorando Manafe. "Soda Molek: Efektifitas Pelayanan Publik Di Kelurahan ..."		<1%
25	Student papers	
Udayana University		<1%

26 Publication

Emilsyah Nur. "MEDIA WHATS APP SEBAGAI RUANG POLITIK DALAM MENGHADAP... <1%

27 Student papers

Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur <1%

28 Student papers

UIN Sunan Gunung Djati Bandung <1%

29 Student papers

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa <1%

30 Student papers

IIN Walisongo <1%

31 Publication

Zainuddin Zainuddin, Resmiyati Ansar. "AKUNTABILITAS PRAKTIK PENGELOLAAN ... <1%

32 Publication

Kristhiana Anthonia Laratmase. "KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PEL... <1%

33 Student papers

Universitas Negeri Jakarta <1%

34 Student papers

Universitas Pamulang <1%

35 Publication

Hendri Herman, Vargo Christian L. Tobing. "Peran Kualitas Pelayanan dan Kualita... <1%

36 Student papers

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung <1%

37 Publication

MAKSI MAKSI MAKSI. "Volume 3 Nomor 1 Juni 2012", JURNAL RISET AKUNTANSI D... <1%

38 Publication

Muhammad Rizki Nur Kandias, Nia Karniawati. "Fenomena Partisipasi Masyarakat... <1%

39 Student papers

Universitas Negeri Makassar <1%

40

Student papers

Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya

<1%

41

Student papers

Bournemouth University

<1%

42

Student papers

UIN Jambi

<1%

43

Student papers

Unika Soegijapranata

<1%

44

Student papers

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<1%

ABSTRACT

TEUKU MUHAMAD HIKMAT NURSALIM. S2121014. THE IMPACT OF VILLAGE HEAD POLITICAL COMMUNICATION ON PUBLIC SERVICE PERFORMANCE IN BONGOIME VILLAGE, TILONGKABILA SUBDISTRICT, BONE BOLANGO REGENCY

This research aims to know the impact of the village head's political communication on public service performance in Bongoime Village, Tilongkabila Subdistrict, Bone Bolango Regency. A quantitative approach with a survey method is employed for this research, involving a sample size of 41 participants. Data analysis employs simple linear regression analysis. The results indicate that the village head's political communication significantly impacts public service performance in Bongoime Village, categorizing the impact as moderate. This research suggests that the political communication efforts of the Bongoime Village Head have not been fully effective in enhancing the public service performance of the village government staff.

Keywords: *performance, public service, political communication*



ABSTRAK

TEUKU MUHAMAD HIKMAT NURSALIM. S2121014. PENGARUH KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI DESA BONGOIME KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi politik kepala desa terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 41 orang. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik kepala desa berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime, dengan kategori sedang yang menunjukkan bahwa komunikasi politik Kepala Desa Bongoime belum begitu maksimal dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik aparatur pemerintah Desa.

Kata kunci: kinerja, pelayanan publik, komunikasi politik



BIODATA MAHASISWA

Nama : Teuku Muhamad Hikmat Nursalim
Nim : S2121014
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 12 Juni 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan Darah : O
Alamat : Jl. Kutai no.17 Kel. Padebuolo
Kecamatan : Kota Timur
Provinsi : Gorontalo
Agama : Islam
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Riwayat Pendidikan

SD : SD NEGERI 46 HULONTALANGI
SMP : MTs. Alkhairaat Kota Gorontalo
SMA : SMA NEGERI 1 KOTA GORONTALO
Email : salimhabibie75@gmail.com